

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

SITI JUWENY



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

Oleh

(Tesis)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI**

Pada

**Program Magister ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

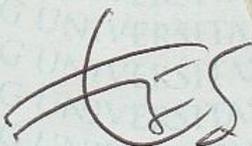
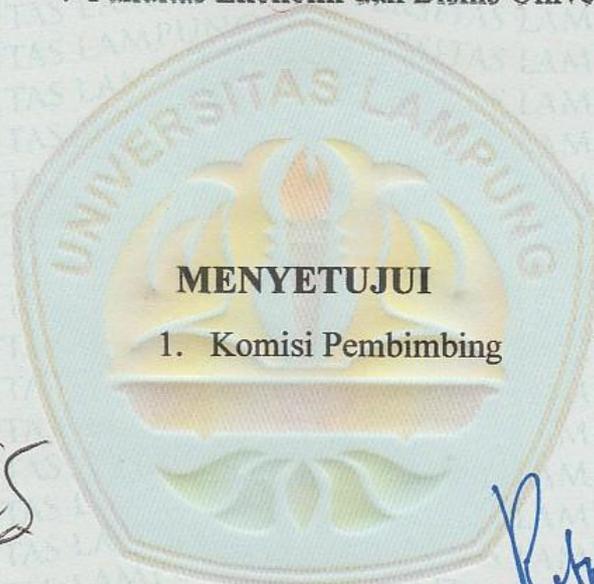
Judul Tesis : **PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Siti Juweny**

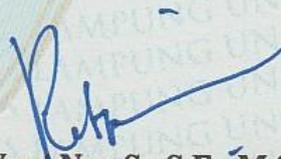
No. Pokok Mahasiswa : 1421031035

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001



Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19780603 200604 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

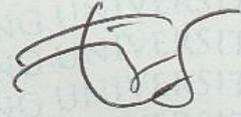


Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

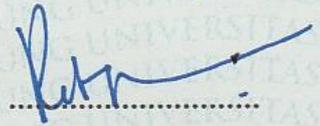
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**



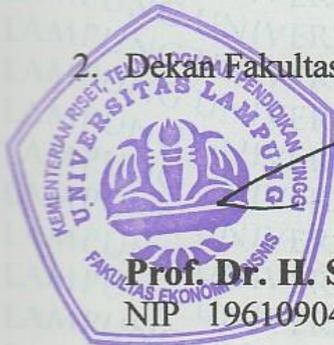
Sekretaris : **Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt.**



Penguji Utama : **Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **26 Juli 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiatisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juli 2016
Pembuat Pernyataan,



Siti Juweny
NPM 1421031035

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence on effect of the characteristics of local government (size, level of wealth, dependence level and government expenditures) and BPK audit findings to the performance of local government in Indonesia. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD). The research sample are 99 local government for 2011-2013. Examination of hypothesis conducted by using pooled data regression in Eviews version 8 software. Results of thi study indicated that size and level of wealth significant positive effect on the performance of local government in Indonesia. While dependence level, government expenditures and BPK audit findings had not significant effect to the performance of local government in Indonesia.

Keywords: characteristic of local government, local government performance, local government performance reporting, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD),BPK audit findings.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang sumber informasi utamanya berasal dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Sampel penelitian adalah 99 provinsi untuk tahun 2011-2013. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan *Eviews versi 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda provinsi di Indonesia. Sementara tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda provinsi di Indonesia.

Kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), temuan audit BPK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tesis dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA“** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini memiliki kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki Penulis, namun berkat adanya arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka Tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA, Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama terima kasih atas bimbingan, inspirasi dan bantuannya selama ini sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;

5. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama terima kasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga Penulis bisa membuat tesis ini menjadi lebih baik;
6. Ibu Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Pendamping terima kasih atas waktu, saran dan masukan yang telah ibu berikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Fitra Darma, S.E., M.Si selaku Pembahas II terima kasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga Penulis bisa membuat tesis ini menjadi lebih baik;
8. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama Penulis menjadi mahasiswi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
9. *State Accountability Revitalization (STAR)* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terima kasih atas beasiswa yang diberikan kepada Penulis;
10. Bupati Lampung Tengah terima kasih atas SK Tugas Belajar yang diberikan kepada Penulis;
11. Mas Andri dan Mba Leni serta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Akuntansi yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan dan penyelesaian Tesis;
12. Ayah, Emak, Bapak Mertua, Ibu Mertua terima kasih untuk dukungan yang diberikan, untuk seluruh kasih sayang dan doa dalam perjalanan hidupku, sehingga mampu menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
13. Suamiku Heri Kurniadi, ST dan kedua anak gadis kecil ku tersayang Lubna dan Clemira yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan Penulis;
14. Abangku Merah Sandi dan adikku Ahmadi serta saudara-saudaraku terima kasih atas doa dan dukungan selama Penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

15. Teman-teman di Angkatan Batch I STAR BPKP Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: mba Heny, mba Reny, mas Sidiq, mas Acep, mba Dwi Laila, Firda, Mega, Tete Lilis, Mas Sukani, mba Sadu, mas Windy, mba Dani, mba FERIA, mba Desi, mba Dewi, mba Mai, mba Eva, mba Ida, mba Ovi, mba Endang, Anifa, Nani, mba Nurul, Uda Jay, pak Fadri semoga silaturahmi kita tidak pernah putus dan terimakasih atas kebersamaan, candatawa, dukungan dan bantuannya selama kita kuliah bersama;
16. Kepala Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Lampung Tengah terimakasih atas izin Tugas Belajar yang diberikan kepada Penulis;
17. Teman-teman Badan Kepegawaian Daerah pak Rudi, mas Andre Sinung, mba Sundari, mas Ketut, Narni, Mba Parti dan seluruh teman-teman BKD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya selama Penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
18. Temen-temen S-1 Ekstensi Unila yang tergabung dalam Iezhors (Can-can, Anne, Ecy, Degram, Hary), terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Kiranya segala bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis,

Siti Juweny

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 24 Maret 1982, putri kedua dari tiga bersaudara dari Pasangan Bapak Agus Zulkarnain dan Ibu Sanah.

Riwayat pendidikan dimulai dengan Pendidikan SD di SDN 1 Kupang Kota Bandar Lampung diselesaikan tahun 1993. SMPN 1 Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 1996, SMKN 4 jurusan Akuntansi tahun 1999. Pada September 2002 Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung dan berhasil diselesaikan pada Maret 2007.

Pada Desember 2002 Penulis diterima sebagai PNS di Kabupaten Lampung Tengah dan ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah. Tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan program Magister Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur beasiswa STAR BPKP.

MOTTO

MAN JADDA WAJADA
Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil

MAN SHABARA ZHAFIRA
Siapa bersabar pasti beruntung

MAN SARA ALA DARBI WASHALA
Siapa menapakì jalan-Nya akan sampai ke tujuan

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini Kepada,
Orangtuaku tercinta Agus Zulkarnain dan Sanah
Suamiku tersayang Heri Kurniadai, ST
Putri sulungku Lubna Rafif Bakhitah
Putri bungsuiku Clemira Zharifa Alodie
Kakakku Merah Sandi
Adikku Ahmadi
Sahabat-sahabatku
Almamater Tercinta Universitas Lampung

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| ABSTRACT | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| RIWAYAT HIDUP..... | x |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI/KAJIAN LITERATUR | |
| 2.1 Teori | 11 |
| 2.1.1 Teori Kontinjensi Struktural | 11 |
| 2.1.2 Kinerja Pemda..... | 13 |
| 2.1.3 Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)..... | 15 |
| 2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 16 |
| 2.1.4.1 Pengertian EKPPD | 16 |
| 2.1.4.2 Maksud dan Tujuan EKPPD | 17 |

| | |
|--|----|
| 2.1.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD | 18 |
| 2.1.4.4 Metodologi EKPPD | 18 |
| 2.1.4.5 Instrumen EKPPD | 23 |
| 2.1.5 Karakteristik Pemda | 27 |
| 2.1.5.1 Ukuran Daerah | 30 |
| 2.1.5.2 Tingkat Kekayaan Daerah | 31 |
| 2.1.5.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat | 32 |
| 2.1.5.4 Belanja Daerah | 33 |
| 2.1.5.5 Temuan Audit BPK | 34 |
| 2.2 Rerangka Pemikiran | 36 |
| 2.3 Pengembangan Hipotesis | 36 |
| 2.3.1 Ukuran Daerah | 36 |
| 2.3.2 Kekayaan Daerah | 37 |
| 2.3.3 Tingkat Ketergantungan Daerah | 38 |
| 2.3.4 Belanja Daerah | 39 |
| 2.3.5 Temuan Audit BPK | 40 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Desain Penelitian | 41 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 41 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 42 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 42 |
| 3.5 Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel | 43 |
| 3.5.1 Variabel Dependen | 43 |
| 3.5.1.1 Variabel Kinerja Pemda | 43 |
| 3.5.2 Variabel Independen | 44 |
| 3.5.2.1 Variabel Ukuran Daerah | 44 |
| 3.5.2.2 Variabel Tingkat Kekayaan Daerah | 45 |
| 3.5.2.3 Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pusat | 46 |
| 3.5.2.4 Variabel Belanja Daerah | 47 |
| 3.5.2.5 Variabel Temuan Audit BPK | 48 |
| 3.6 Metode Analisis Data | 49 |
| 3.6.1 Statistik Deskriptif | 49 |
| 3.6.2 Analisis Regresi Data Panel | 50 |
| 3.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2) | 54 |
| 3.6.4 Uji Asumsi Klasik | 54 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 4.1 Deskripsi Data | 56 |
| 4.1.1 Seleksi Sampel | 56 |
| 4.1.2 Statistik Deskriptif | 57 |
| 4.2 Pengujian Hipotesis | 59 |

| | |
|--|----|
| 4.3 Pembahasan..... | 63 |
| 4.3.1 Ukuran Daerah | 63 |
| 4.3.2 Kekayaan Daerah | 64 |
| 4.3.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat | 65 |
| 4.3.4 Belanja Daerah..... | 67 |
| 4.3.5 Temuan Audit BPK..... | 68 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---|----|
| 5.1 Simpulan..... | 71 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Daftar PAD, Temuan BPK dan Skor EKPPD Provinsi di Indonesia Tahun 2013 | 4 |
| 4.1 Statistik Deskriptif | 57 |
| 4.2 Ringkasan Hasil Olah Statistik | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------|---------|
| Gambar | |
| 1. Rerangka Penelitian | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Tujuan desentralisasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel (Penjelasan PP No. 6 Tahun 2008).

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD adalah evaluasi yang dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil dari EKPPD tersebut berupa laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama dalam penilaiannya. Selain LPPD, informasi pelengkap untuk EKPPD ini antara lain laporan pertanggungjawaban APBD, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi Pemda. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda

sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu Pemda sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Sementara itu, salah satu pengukuran kinerja pada EKPPD ini adalah pengukuran pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yaitu LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengungkapkan temuan audit BPK atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut.

Berdasarkan EKPPD tahun 2013 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2013 rata-rata pemda provinsi berkinerja tinggi, hanya provinsi Jawa Timur yang berkinerja sangat tinggi. Adapun pemda yang

mendapatkan predikat kinerja sedang yaitu Provinsi Bali, Papua, dan Maluku Utara.

Tabel 1.1
Daftar PAD, Temuan BPK dan SKOR EKPPD
Provinsi di Indonesia tahun 2013

| NO | PROVINSI | PAD (Rp) | TEMUAN BPK (Rp.) | SKOR EKPPD |
|----|--------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Jakarta | 26.852.192,45 | 1.459.999,53 | 2,6234 (Tinggi) |
| 2 | Jawa Barat | 12.360.109,87 | 9.651,03 | 2,7267 (Tinggi) |
| 3 | Jawa Timur | 11.579.340,71 | 70.245,83 | 3,0519 (Sangat Tinggi) |
| 4 | Jawa Tengah | 8.212.800,64 | 1.042,48 | 2,9217 (Tinggi) |
| 5 | Kalimantan Timur | 5.885.262,00 | 3.080,91 | 2,6718 (Tinggi) |
| 6 | Banten | 4.118.551,71 | 64.180,65 | 2,1358 (Tinggi) |
| 7 | Sumatera Utara | 4.091.285,88 | 51.980,90 | 2,5299 (Tinggi) |
| 8 | Riau | 2.725.623,91 | 77.452,17 | 2,0266 (Tinggi) |
| 9 | Sulawesi Selatan | 2.560.045,63 | 17.945,88 | 2,6905 (Tinggi) |
| 10 | Bali | 2.529.976,14 | 3.292,66 | 1,7121 (Sedang) |
| 11 | Kalimantan Selatan | 2.502.279,21 | 2.480,73 | 2,4809 (Tinggi) |
| 12 | Sumatera Selatan | 2.021.696,78 | 6.629,87 | 2,5298 (Tinggi) |
| 13 | Lampung | 1.771.297,93 | 9.364,48 | 2,4001 (Tinggi) |
| 14 | Sumatera Barat | 1.366.178,10 | 3.601,47 | 2,2352 (Tinggi) |
| 15 | Kalimantan Barat | 1.347.396,42 | 5.791,55 | 2,3828 (Tinggi) |
| 16 | Aceh | 1.325.435,09 | 13.446,25 | 2,3148 (Tinggi) |
| 17 | Yogyakarta | 1.216.102,74 | 301,81 | 2,7669 (Tinggi) |
| 18 | Kalimantan Tengah | 1.093.821,48 | 2.476,23 | 2,1054 (Tinggi) |
| 19 | Jambi | 1.063.879,90 | 7.874,48 | 2,3222 (Tinggi) |
| 20 | Kepulauan Riau | 907.982,18 | 5.309,37 | 2,7587 (Tinggi) |
| 21 | NTB | 858.154,09 | 33.660,09 | 2,5953 (Tinggi) |
| 22 | Sulawesi Utara | 789.631,75 | 16.335,75 | 2,1284 (Tinggi) |
| 23 | Sulawesi Tengah | 662.226,61 | 18.314,17 | 2,1267 (Tinggi) |
| 24 | Papua | 633.726,31 | 13.996,70 | 1,5958 (Sedang) |
| 25 | Bengkulu | 525.207,93 | 2.435,03 | 2,1177 (Tinggi) |
| 26 | NTT | 523.201,21 | 1.542,04 | 2,0819 (Tinggi) |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 514.857,03 | 20.501,92 | 2,2684 (Tinggi) |
| 28 | Bangka Belitung | 495.786,50 | 3.642,09 | 2,4294 (Tinggi) |
| 29 | Maluku | 304.364,50 | 98.799,74 | 2,2045 (Tinggi) |
| 30 | Papua Barat | 236.282,89 | 19.315,94 | 2,0151 (Tinggi) |
| 31 | Gorontalo | 214.614,52 | 1.207,06 | 2,5310 (Tinggi) |
| 32 | Maluku Utara | 165.886,90 | 21.237,26 | 1,3523 (Sedang) |
| 33 | Sulawesi Barat | 154.131,86 | 5.996,35 | 2,2301 (Tinggi) |

Sumber: Data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pemda provinsi di Indonesia rata-rata berada pada skor 2,00-3,00 yang berarti kinerja tinggi. Adapun jika dilihat dari salah satu karakteristik pemda yaitu PAD, seharusnya pemda yang memiliki PAD sangat tinggi dapat memperoleh skor EKPPD yang sangat tinggi, tetapi pada kenyataannya banyak provinsi yang hanya memperoleh skor EKPPD dengan nilai tinggi. Adapun jika dilihat dari temuan audit BPK, seharusnya provinsi dengan temuan audit BPK yang rendah skor EKPPD yang diperoleh adalah sangat tinggi, tetapi pada kenyataannya banyak provinsi yang hanya memperoleh skor EKPPD dengan nilai tinggi. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, apakah karakteristik pemda dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja pemda provinsi di Indonesia.

Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan pada Pemda Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik Pemda sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri atas (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan eksternal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto et al. (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP, penelitian tersebut menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diprosikan dengan *size* daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age*, dan latar belakang pendidikan kepala daerah

sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*.

Penelitian tentang karakteristik pemda dan temuan audit telah banyak dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) menunjukkan bahwa ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemda sedangkan belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda. Penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa ukuran Pemda, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, dan belanja modal terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota, sedangkan temuan audit BPK, tingkat kekayaan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian Renas dan Muid (2014) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah dan status pemda berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel ukuran daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

Penelitian-penelitian tersebut di atas menghasilkan temuan yang masih kontradiksi. Proksi yang masih menghasilkan temuan yang kontradiksi dari karakteristik pemda adalah ukuran Pemda yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah. Temuan audit BPK juga masih menghasilkan temuan yang kontradiksi.

Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemda tersebut. Pemda juga memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Setiap Pemda juga mendapatkan dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing Pemda, semakin tinggi presentase DAU yang didapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal.

Selain dari sisi pendapatan, karakteristik Pemda bisa juga dilihat dari sisi belanja daerah Pemda yang juga beragam disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang dimilikinya. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh Pemda tersebut untuk masyarakatnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pemda tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada, dan adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menguji apakah

karakteristik Pemda yang terdiri atas ukuran Pemda, tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi yang diukur dengan nilai EKPPD yang sumber utama informasinya dari LPPD.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012) dengan perbedaan dalam dua hal. Perbedaan pertama, peneliti menggunakan total belanja modal untuk mengukur variabel belanja daerah karena belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012). Menurut Nugroho dan Rohman (2012) Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Perbedaan kedua, sampel penelitian dalam penelitian ini adalah provinsi di Indonesia tahun 2011-2013.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia?
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia?
5. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.

4. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh belanja daerah terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada di setiap lingkungan Pemda serta menganalisis terhadap pengaruh karakteristik Pemda dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda di Indonesia.
2. Secara Praktis untuk memberikan kontribusi kepada Pemda, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Pemda sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang dimiliki Pemda, sehingga Pemda dapat meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI / KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori

2.1.1 Teori Kontinjensi Struktural

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya yang kurang memperhatikan pengaruh lingkungan (*environment*), teori kontinjensi memberi perhatian terhadap dampak sifat lingkungan pada struktur dan strategi organisasi, jika manajemen menghendaki hasil yang optimal (Gudono, 2014). Secara umum teori kontinjensi menyatakan bahwa perancangan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan dimana sistem tersebut akan diterapkan (Fisher, 1995 dalam Hidayati, 2002).

Hampir semua penulis dan peneliti terkait dengan kontinjensi mengemukakan setidaknya ada 3 yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu: ukuran organisasi, teknologi yang digunakan dan lingkungan. Menurut Reiney (2003 dalam Manedi, 2015) dimensi lingkungan organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kondisi teknologi, hukum, politik, ekonomi, demografi, ekologis dan budaya.

Teori ketidakpastian struktural merupakan paradigma yang berorientasi pada hipotesis umum tentang organisasi harus berorientasi pada kebutuhan internal utamanya dan harus dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya (Scott,

1983 dalam Roen 2011). Lawrence dan Lorsch (1967 dalam Roen, 2011) mengatakan bahwa organisasi dan lingkungan bagaikan dua gambar pada sebuah mata uang. Mereka mengemukakan bahwa ketidakpastian dan perubahan lingkungan akan sangat mempengaruhi perkembangan pada struktur internal organisasi.

Teori kontinjensi struktural menempatkan performansi organisasi sebagai kecenderungan (*affected*) terhadap kecocokan (*fit*) atau ketidakcocokan (*misfit*) antara struktur dan situasi/*contingency* (Donalson, 1985 dalam Roen, 2011).

Teori ini merangkum bahwa tiap organisasi mengadaptasi struktur dengan menggeser keadaan yang tidak cocok (*misfit*) sebagai akibat adanya performansi rendah kepada keadaan cocok (*fit*). Dimana ada keteraturan untuk mencapai efektifitas dan performansi organisasi, atau perubahan struktural sifat positif dan produktif terhadap organisasi. Jadi argumen teori ini adalah bahwa organisasi secara individual beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Kontribusi teori kontinjensi struktural adalah usaha memaksimalkan struktur sebuah organisasi (Roen, 2011).

Ada 3 konsep pengukuran fit dalam teori kontinjensi:

1. Pendekatan *gestalt*. Pendekatan ini mendasarkan pada kecocokan internal antara berbagai karakteristik organisasi. Pendekatan ini sering kali diuji dengan menggunakan bentuk *ecludian distance*. Dalam tulisan Van de Ven diuraikan bahwa kinerja baik adalah fungsi dari seberapa besarnya kecocokan variable X1 dan X2 tersebut. Dan “Kondisi Ideal” itu hanya bisa dihasilkan oleh perpaduan antara X1 dan X2 dalam kadar yang tepat.

2. Pendekatan asumsi, atau sering juga dikatakan dengan pendekatan interaksi. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa karakteristik organisasi memiliki skala kontiniu. Konsep ini dianut setelah Burns dan Stalker (1961 dalam Manedi, 2015) menyatakan bahwa gaya manajemen bisa direntang dari mekanistik dan organik. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada kecocokan antara karakteristik organisasi dengan karakteristik lingkungan. Dalam pendekatan interaksi posisi fit terjadi disepanjang garis kombinasi dua faktor kontingensi.
3. Pendekatan seleksi yang beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah diteliti dan diamati telah beroperasi dalam kondisi ekuilibrium. Peneliti yang memakai pendekatan ini adalah Simon (1987 dalam Manedi, 2015) yang meneliti perbedaan sistem pengendalian manajemen pada berbagai perusahaan yang memiliki topologi strategi yang berbeda.

Berdasarkan teori kontinjensi dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau pemda dalam meningkatkan kinerjanya tergantung bagaimana pemda tersebut mengoptimalkan karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan yang ada pada pemda tersebut.

2.1.2 Kinerja Pemda

Bastian (2006 h. 274) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian

yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi.

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006). Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, Pemda memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan sistem pengukurun kinerja publik sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD,

2. Efisiensi biaya,
3. Efektivitas program,
4. Pemerataan dan keadilan

2.1.3 Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda di Indonesia dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai penyerahan kewenangan beberapa urusan pusat ke daerah sehingga daerah memiliki kapasitas untuk mengatur pemerintahan yang lebih efektif di daerah (Yasin, 2011).

Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah dan untuk perwujudan *Good Corporate Governance*, Pemda wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya, baik dari sisi keuangannya maupun dari tata kelolanya. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah wajib memberikan laporan kinerja dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat setiap tahunnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah (PP No. 3 Tahun 2007). LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

2.1.4.1 Pengertian EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sumber informasi utamanya adalah LPPD dan informasi pelengkap lainnya seperti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi Pemda. Evaluasi ini dilakukan sejak tahun 2009 (PP No. 6 Tahun 2008).

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dilakukan secara terukur, dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan

LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam Evaluasi ini adalah Desk Evaluation terhadap LPPD yang disusun oleh Pemda (disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir) dan melakukan Peninjauan Lapangan terhadap daerah yang masuk kategori berprestasi kinerja terbaik hasil Desk Evaluation (Juknis EKPPD, 2015).

2.1.4.2 Maksud dan Tujuan EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada pemda yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD;
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

2.1.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012;
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.4 Metodologi EKPPD

Metode EKPPD dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

1. Indeks Capaian Kinerja

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;

- 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
- 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- 12) Pengelolaan potensi daerah; dan
- 13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (total 35 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan provinsi total 39 IKK, Kabupaten 44 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

- b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.

Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu:

- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) Penataan kelembagaan daerah;
- 4) Pengelolaan kepegawaian daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Setiap IKK dinilai untuk

masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi

Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

c. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja dibagi 2 yaitu :

1. Urusan Wajib, terdiri dari:

a) Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

b) pemerintah Kabupaten 79 IKK.

c) Pemerintah Kota 78 IKK.

2. Urusan Pilihan, terdiri dari:

a) Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

b) Pemerintah Kabupaten 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

c) pemerintah Kota 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Untuk meyakini capaian kinerja Pemerintah Daerah perlu field

evaluation khususnya capaian kinerja yang memerlukan dukungan

elemen data.

d. Metode Penilaian Capaian Kinerja

Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang

(S) = 2, Rendah (R) = 1 tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara

sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK

a) Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan

waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda

APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya.

- b) Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah.
- c) Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi.

2. Kriteria khusus

- a) Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya.
- b) Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

2. **Indeks Kesesuaian Materi**

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

- a. Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan) dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

- b. Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi.
- c. Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai konsistensi sistematika pelaporan, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.5. Instrumen EKPPD

Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek, tiap fokus, dan tiap indikator berdasarkan pada banyaknya IKK dan agreasi IKK pada lampiran LPPD Provinsi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek:
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (8%).
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12,75%).

- 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5,75%).
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
 - 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
 - 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
 - 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
 - 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
 - 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah (3%).
 - 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,75%).
 - 12) Pengelolaan potensi daerah (5%).
 - 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8,75%).
- b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari:

- 1) 8 aspek Umum untuk 34 urusan dengan bobot 40% (dari 70%).

Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut:

- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
- 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
- 3) Penataan kelembagaan daerah (10%).
- 4) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
- 5) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
- 6) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
- 7) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
- 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%).

- 2) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%).

1. Untuk Urusan Wajib diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan

wajib tersebut terdiri dari:

- a) Pendidikan (14%).
- b) Kesehatan (15%).
- c) Lingkungan Hidup (5%).
- d) Pekerjaan Umum (5%).
- e) Koperasi dan UKM (3%).
- f) Perumahan (4%).
- g) Ketahanan Pangan (3%).
- h) Kependudukan dan Catatan Sipil (2%).
- i) Tenaga Kerja (3%).
- j) Perencanaan Pembangunan (5%).
- k) Kepemudaan dan Olahraga (3%).

- l) Penanaman Modal (2%).
 - m) Tata Ruang (3%).
 - n) Otonomi Daerah (3%).
 - o) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3%).
 - p) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (3%).
 - q) Perhubungan (2%).
 - r) Komunikasi dan Informatika (3%).
 - s) Pertanahan (1%).
 - t) Kesatuan Bangsa dan Politik (3%).
 - u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%).
 - v) Sosial (3%).
 - w) Budaya (3%).
 - x) Statistik (1%).
 - y) Kearsipan (3%).
 - z) Perpustakaan (3%).
- 2) Untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Kedelapan urusan pilihan yang dimaksud adalah:
- a) Kelautan dan Perikanan (15%).
 - b) Pertanian (20%).
 - c) Kehutanan (10%).
 - d) Energi dan SDM (10%).
 - e) Pariwisata (10%).
 - f) Industri (15%).
 - g) Perdagangan (15%).

h) Transmigrasi (5%).

2. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas:

- a) Desentralisasi (65%)
- b) Tugas Pembantuan (20%)
- c) Tugas Umum Pemerintahan (10%)
- d) Kelengkapan laporan (5%)

2.1.5 Karakteristik Pemda

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia (2006) karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, karakteristik Pemda adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Pemda, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan Pemda lain.

Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan pada Pemda Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri atas (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan eksternal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto et al. (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik Pemda terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP, penelitian tersebut menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007).

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik Pemda

dimana struktur organisasi diproksikan dengan *size* daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age*, dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset, ukuran legislatif dengan proksi jumlah DPRD, umur administrasi pemda, kekayaan pemda dengan proksi logaritma Pendapatan Asli Daerah, *intergovernmental revenue* dengan proksi total dana perimbangan terhadap total belanja, jumlah SKPD dan latar belakang pendidikan.

Waluyani dan Mahmud (2015) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan *size* dengan proksi logaritma aset, umur pemda, *leverage* dengan proksi total hutang terhadap total aset dan *intergovernmental revenue* dengan proksi total dana perimbangan terhadap total pendapatan.

Kusumawardani (2012) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan *size* dengan proksi total aktiva, kemakmuran dengan proksi produk domestik bruto, ukuran legislatif dengan proksi jumlah DPRD, dan *leverage* dengan proksi hutang terhadap modal.

Marfiana dan Kurniasih (2013) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset, tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan daerah dengan proksi DAU terhadap total pendapatan, belanja

daerah dengan proksi total realisasi belanja daerah dan ukuran legislatif dengan proksi jumlah DPRD.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset, tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan daerah dengan proksi DAU terhadap total pendapatan, belanja daerah dengan proksi total realisasi belanja daerah.

Sudarsana dan Rahardjo (2013) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset, tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan daerah dengan proksi DAU terhadap total pendapatan, belanja modal dengan proksi belanja modal terhadap total belanja.

Renas dan Muid (2014) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran daerah dengan proksi total pendapatan, tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, status pemda, dana perimbangan dengan proksi total dana perimbangan terhadap total pendapatan, dan belanja daerah dengan proksi belanja modal terhadap total belanja.

Sedyaningsih dan Zaky (2015) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemda dengan proksi total aset, tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan daerah dengan proksi DAU terhadap total pendapatan, belanja modal dengan proksi belanja modal terhadap total belanja.

Nurdin (2015) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan tingkat kekayaan daerah dengan proksi total PAD terhadap total pendapatan, tingkat ketergantungan daerah daerah proksi total dana perimbangan terhadap total pendapatan, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemda.

2.1.5.1 Ukuran Daerah

Ukuran (*size*) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi (Patrick, 2007). Terdapat bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi didalam suatu daerah dapat mempengaruhi struktur daerah. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (*wikipedia.com*, 2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007; Cohen dan Kaimenakis, 2008).

Penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Dengan penelitian dalam perusahaan tersebut, ukuran juga dapat menjelaskan ukuran organisasi di sektor publik. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Begitu pula dalam sektor pemerintah, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelola keuangannya. Ukuran (*size*) dapat diukur dengan

berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991).

Kusumawardani (2012) menyatakan ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar juga untuk melakukan pengungkapan kinerja. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat berita baik. Berita baik tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya meningkatkan kerjanya.

2.1.5.2 Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Juliawati *et al.* (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya

yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati *et al.*, 2012). PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

2.1.5.3 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

2.1.5.4 Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemda yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemda, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah, 2006).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemda. Untuk menambah aset tetap, Pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah, 2006).

2.1.5.5 Temuan Audit BPK

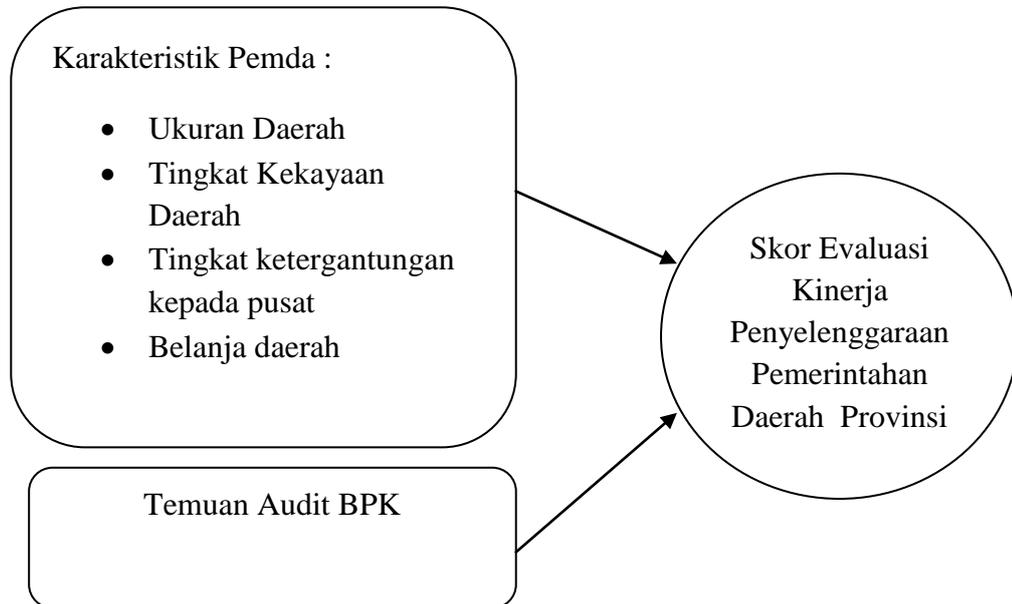
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemda (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Rerangka Pemikiran



Bagan 1 Rangka pemikiran teoretis

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Ukuran Daerah

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin besar aset yang dimiliki pemda, semakin banyak pemda memiliki sarana infrastruktur untuk masyarakat, baik itu jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi lainnya diasumsikan bahwa pemda tersebut telah memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Adapun kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Patrick (2007) bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan GASB 34. Mustikarini dan Fitriasari (2012) ukuran daerah dengan proksi total aset berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda. Kusumawardani (2012) ukuran Pemda dengan proksi total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Provinsi.

2.3.2 Kekayaan Daerah

Hartoyo (2014) menyatakan bahwa jika PAD dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan dan potensi daerah maka akan dapat menumbuhkan daya saing kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan.

Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Adapun kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Setyaningrum (2012), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Renas dan Muid (2014) dan Nurdin (2015), bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif baik terhadap skor kinerja Pemda, akuntabilitas kinerja Pemda maupun tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Provinsi.

2.3.3 Tingkat Ketergantungan Daerah

Selain ukuran dan tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemda provinsi terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dengan kata lain DAU menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang akan menambah Pendapatan Daerah.

Sayangnya, menurut Damayanty (2011), formulasi perhitungan DAU tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD karena merasa dapat mengandalkan DAU. Secara tidak langsung, semakin tinggi presentase DAU yang didapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal. Tingginya persentase jumlah dana perimbangan mengindikasikan bahwa Pemda tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan

bahwa Pemda tidak mampu dalam merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nurdin, 2015). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Setyaningrum (2012), Sedyaningsih dan Zaky (2015) dan Nurdin (2015) bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif baik terhadap kinerja penyelenggaraan pemda, akuntabilitas kinerja pemda maupun tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda Provinsi.

2.3.4 Belanja Daerah

Jika ketiga karakteristik di atas terkait dengan kekayaan dan pendapatan Pemda maka karakteristik keempat ini akan dilihat dari sisi belanja Pemda. Menurut UU No. 23/2014 Pasal 298 ayat 1, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja Pemda seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja Pemda tersebut.

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) yang membuktikan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda., maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Provinsi.

2.3.5 Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), Marfiana dan Kurniasih (2013), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Sedyaningsih dan Zaky (2015) bahwa temuan audit berpengaruh negatif baik terhadap kinerja pemda maupun kinerja keuangan Pemda, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda Provinsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik Pemda yang diukur dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda. Menurut Sekaran (2009), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antarkelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2009). Menurut Cooper (2009) populasi adalah total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat simpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemda Provinsi seluruh Indonesia.

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2009). Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* dengan ketentuan Pemda provinsi yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI, Neraca untuk mendapatkan Total Aset, data realisasi APBD

untuk mendapatkan PAD, DAU, total anggaran pendapatan, belanja modal, total belanja serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan audit BPK tahun 2011-2013 untuk mendapatkan jumlah temuan audit.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data hasil pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi untuk LPPD tahun 2011-2013 didapatkan melalui *website* Kementerian Dalam Negeri yaitu <http://www.kemendagri.go.id>.

Data neraca Pemda untuk mendapatkan total aset, data realisasi APBD untuk mendapatkan PAD, DAU, belanja modal, total belanja dan total pendapatan didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi seluruh Indonesia tahun 2011-2013. Data untuk variabel temuan audit BPK didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I dan II tahun 2012-2014 untuk LKPD tahun 2011-2013. Data Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun anggaran 2011-2013. Data IHPS dan LKPD diperoleh dari Kantor Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI di Jakarta.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Hariyanto (2013) metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi pustaka, yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.5. Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Sekaran (2009) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan dependen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Variabel Dependen

3.5.1.1 Variabel Kinerja Pemda

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi (Renas, 2014). Untuk menilai apakah kinerja Pemda Provinsi di Indonesia sudah baik atau belum, perlu mengacu hasil pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI yang penilaian utamanya

menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan hasil pemeringkatan EKPPD secara nasional dilakukan Pemerintah dengan cara:

- a. Penilaian portfolio dengan cara *desk evaluation*, yaitu evaluasi yang dilakukan berdasarkan data yang dimuat dalam LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah.
- b. Peninjauan lapangan terhadap daerah yang berprestasi sangat tinggi dan rendah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kinerja Pemda Provinsi yang berasal dari Laporan Hasil EKPPD berdasarkan LPPD Tahun 2011-2013 tingkat nasional dengan *range* nilai 0-4. Skor 0-1,00 = berprestasi rendah, skor 1,01-2,00 = berprestasi sedang, skor 2,01-3,00 = berprestasi tinggi dan skor 3,01-4,00 = berprestasi sangat tinggi.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 2009). Variabel independen di penelitian ini adalah karakteristik Pemda yang diukur menggunakan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan Audit BPK.

3.5.2.1 Variabel Ukuran Daerah

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut.

Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Begitu

pula dalam sektor pemerintah, Pemda yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelola keuangannya. *Size* dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Penelitian lain yang dilakukan Baber (2010) menggunakan populasi penduduk sebagai proksi dari *size*. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan log *total revenue* sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemda. Penelitian Mustikarini dan Fitriyasari (2012) ukuran Pemda dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini variabel ukuran menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset. Total aset tersebut berasal dari Neraca. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di log natural (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

3.5.2.2 Variabel Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib. Secara teoretis pengukuran kekayaan daerah diukur dari PAD. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Abdullah (2006), kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan daerah diukur dengan:

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.5.2.3 Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemda. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat

diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Maka pada penelitian ini variabel tingkat ketergantungan pada pusat diukur dengan:

Tingkat ketergantungan pada pusat =

$$\frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.5.2.4 Variabel Belanja Daerah

Realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah mencerminkan seberapa besar porsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja modal. Hal ini sesuai dengan pernyataan DJPK (2013) yang menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Adapun realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Penelitian Sudarsana (2013), Renas (2014) dan Sedyaningsih dan Zaky (2015), belanja daerah diukur menggunakan belanja modal dibandingkan dengan total belanja. Maka pada penelitian ini variabel belanja daerah diukur dengan:

Belanja Daerah =

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total belanja}}$$

3.5.2.5. Variabel Temuan Audit BPK

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian Negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (BPK, 2013). Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda dan kerugian material yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, temuan audit terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Pemda tersebut dalam melakukan setiap kegiatannya kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku (Sedyaningsih dan Zaki, 2015).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung dan adanya temuan audit di beberapa daerah.

Tujuan dari audit BPK adalah memeriksa setiap satuan rupiah yang disimpan, diolah dan dikelola oleh pejabat dalam melakukan tugasnya. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan

oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Maka pada penelitian ini variabel temuan audit BPK diukur dengan:

$$\text{Temuan Audit BPK} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam Rp)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

3.6. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh karakteristik Pemda dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2011-2013 maka metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan bantuan *software Eviews ver 8*, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik diantaranya :

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, deviasi standar, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali dan

Ratmono, 2013). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali dan Ratmono, 2013). Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel yaitu gabungan antara data *timeseries* dan *cross-section*. Data panel sering disebut juga *pooled data* (*pooling time series* dan *cross-section*), *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, dan *cohort analysis*. Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit *cross-sectional*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (dataset) dimana perilaku unit cross-sectional (misalnya individu, perusahaan, negara) diamati sepanjang waktu (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Menurut Wibisono (2005 dalam Ajija *et al.*, 2011) keunggulan regresi data panel antara lain : *Pertama*. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara ekspilisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; *kedua*. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks; *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat

bebas atau derajat kebebasan (*degrees of freedom/df*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; *Kelima*, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; *Keenam*, Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Menurut Widarjono (2007 h. 251), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

1. Model *Common Effect*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Adapun pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu. Akan tetapi metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

3. Model Efek Random (*Random Effect*)

Metode *Random Effect* adalah metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik yang digunakan dalam Metode *Random Effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar entitas. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, atau metode *Random Effect* (Widarjono, 2007).

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan metode *Common Effect* atau dengan metode *Fixed Effect*, apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji Hausman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji *Hausman* untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood ratio test*, dengan asumsi yaitu:

H₀: model mengikuti *Common*, dan H₁: model mengikuti *Fixed*.

Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test dengan asumsi, yaitu:

H₀: model mengikuti *Random Effect* H₁: model mengikuti *Fixed Effect*.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah pengaruh karakteristik pemda yang terdiri dari ukuran daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK, sedangkan variabel dependen adalah kinerja pemda. Penelitian ini menduga bahwa kinerja pemda dipengaruhi oleh karakteristik pemda yang terdiri dari ukuran daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK. Namun demikian ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemda yang tidak diteliti. Adapun model regresi data panel sebagai berikut :

$$\text{SCORE}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE}_{it} + \beta_2 \text{PAD}_{it} + \beta_3 \text{DAU}_{it} + \beta_4 \text{BD}_{it} + \beta_5 \text{TEMUAN}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

| | |
|--|-------------------------------------|
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5,$ | = Koefisien variabel independen |
| β_0 | = Konstanta |
| ε | = Koefisien error |
| SCORE | = Skor Kinerja Pemda |
| SIZE | = Ukuran daerah |
| PAD | = Tingkat kekayaan daerah |
| DAU | = Tingkat ketergantungan pada pusat |
| BD | = Belanja daerah |
| TEMUAN | = Temuan audit BPK |

Pengujian model regresi data panel untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program *EVIIEWS ver 8*. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini:

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $p \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $p \text{ value} < 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

1.6.3 Analisis koefisien determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu karakteristik pemda yang terdiri atas ukuran daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemda. Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.6.4 Uji Asumsi Klasik

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Hariyanto,2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 1992 dalam Iswanto, 2013). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2003; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam Ajija et al., 2011).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Pemda dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemda Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2011-2013. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemda yaitu ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sedangkan karakteristik Pemda lainnya yaitu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan Audit BPK juga tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2013 dikarenakan pada saat peneliti mengolah data, data terbaru EKPPD adalah tahun 2013. Penggunaan sampel provinsi, kabupaten/kota dan tahun yang lebih baru dan lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari kinerja Pemda. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel

provinsi dan kabupaten/kota serta menggunakan data yang lebih baru yaitu tahun 2014, selain itu menggunakan periode waktu yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 17,33% variabel dependen. Dengan demikian 82,67% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel yang lain seperti misalnya tingkat pertumbuhan, jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah fasilitas umum. Atau bisa juga menggunakan variabel-variabel yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilaian skor kinerja seperti misalnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrur R. Sari, Dyah W Sari. Rahmat H Setianto. Martha R Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta. Salemba Empat
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T, and Zhang, Jean X. 2010. An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context. *Working Paper Series. SSRN August*.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. <http://www/bpk.go.id> diakses pada 30 Juli 2015.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S. 2009. *Business Research Methods Tenth edition*. McGraw-Hill International Edition.
- Damanpour, F. 1991. Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal*, Vol. 34: 555-590
- Damayanty, Sofia Arie. 2011. Menelisik Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam *Risiko Fiskal Daerah. Era Adicitra Intermedia*. Jakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
- DJPK. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. www.djpk.go.id. Diunduh tanggal 20 Januari 2016

- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Edisi Pertama. Penerbit UNDIP
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Edisi III Penerbit BPSE Yogyakarta
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*.
- Hariyanto. 2013. Metode Pengumpulan Data. www.belajarpsikologi.com. Diunduh tanggal 9 Februari 2016
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. www.bppk.depkeu.go.id. Diunduh tanggal 22 Januari 2016
- Hidayati, Ataina. 2002. Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: Berbagai Teori dan Pendekatan yang Melandasi. www.blog.uny.ac.id. Diunduh tanggal 01 Mei 2016.
- Iswanto. 2013. Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se- Indonesia). Tesis. Unila.
- Juliawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Syiah Kuala*. Volume I. Tahun I No. 1
- Kemendagri. 2013. Belanja Modal pemda Harus Capai 30 persen. www.keuda.kemendagri.go.id Diunduh 29 Juni 2016.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2015). Penetapan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. www.kemendagri.go.id diunduh 01 September 2015
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.

- Mandell, Lee M. 1997. Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government. *Public Administration Quarterly*; Spring 1997; Vol. 21: 96.
- Manedi, Jons. Teori Organisasi Publik. www.ademia.edu. diunduh tanggal 01 Mei 2016
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaen/Kota. *Journal & Proceeding FEB Unsoed*.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1 Nomor 2 Halaman 1-14
- Nurdin, Fandy. 2015. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Patrick, Patricia A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. Dissertation. The Pennsylvania State University, United States- Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laopran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renas dan Dul Muid. 2014. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 4 Nomor 3.
- Roen, Ferry. 2011. Teori dan Perilaku Organisasi. www.perilakuorganisasi.com. Diunduh 15 Juni 2016.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sedyaningsih, Peni dan Achmad Zaky. 2015. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh karakteristik Pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Lana Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding Psychology, Economy, Art, Architect and Civil*. Gunadarma University.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 Nomor 4, hal 1-13.
- Suhardjanto, D. Rusmin, Mandasari. Putriesti and Brown Alistair. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. *Journal Public Policy January 2010*
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemda (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No.1/November 2011: 1-194*.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Yasin, Akhmad. 2011. *Implikasi Peraturan Daerah terhadap Perekonomian Daerah Dalam Risiko Fiskal Daerah*. Era Adicitra Intermedia. Solo.

Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik dan Amir Mahmud. 2015. Pengaruh karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Semarang.

Westin, Susan S. 1998. Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship. GAO issued May 2005.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.